



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bisnis Bali*

Kategori : *PMD*

Dinas PMD Buleleng Terima Studi Banding Dinas PMD Kabupaten Paser

Singaraja (Bisnis Bali) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buleleng menerima rombongan DPMD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Kedatangan rombongan DPMD Kabupaten Paser ini untuk studi banding mengenai penanganan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dan desa yang ada di Kabupaten Buleleng.

Rombongan diterima langsung oleh Kepala DPMD Kabupaten Buleleng, I Made Subur, S.H. beserta staf di Ruang Rapat DPMD Kabupaten Buleleng, Kamis (12/9).

Ditemui usai kegiatan, Kepala DPMD Kabupaten Paser, Hulaimi menjelaskan kenapa DPMD Buleleng menjadi sasaran studi banding yang dilakukan.

DPMD Kabupaten Paser sendiri mendengar informasi bahwa Buleleng memiliki inovasi-inovasi baru utamanya masalah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di mana di Buleleng terakhir tanggal 31

Desember sudah disahkan. "Saya sangat berterima kasih kepada Kepala DPMD Buleleng karena telah membagi apa yang dilakukan khususnya untuk penetapan APBDes," jelasnya.

Dirinya menambahkan di daerahnya penetapan maupun pengesahan APBDes sering terlambat. Terkadang, APBDes disahkan April atau Mei. Keterlambatan ini menyebabkan pembayaran gaji kepada kepala desa maupun perangkat desa menjadi terlambat juga.

Kebijakan ataupun inovasi yang dilakukan di Buleleng inilah yang dipelajari guna mempercepat pengesahan APBDes di Kabupaten Paser. "Seperti terobosan yang dilakukan oleh DPMD Buleleng sebenarnya bisa membantu per 1 Januari APBDes bisa dieksekusi," imbuh Hulaimi.

Sementara itu, Made Subur mengatakan dirinya membagi inovasi-inovasi maupun terobosan yang dilakukan DPMD Buleleng kepada DPMD Kabupaten Paser. Apalagi dalam rombongan tersebut terdapat pula Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) dan Inspektorat Kabupaten Paser.

Ini menyangkut tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan hingga penanggulangan nantinya oleh pemerintah desa. "Kebetulan juga hadir Kepala BP-KAD dan Inspektorat dari Kabupaten Paser sehingga mereka bisa menyerap dan mempraktikkan apa yang kita lakukan di Buleleng," ujarnya.

Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng ini juga mengungkapkan beberapa inovasi lainnya untuk menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat di desa. Seperti apa yang sudah dilakukan yaitu sekolah desa, gerakan wanita (genta) desa, hatinya PKK, dan jaksa jaga desa.

Termasuk pengamprahan penghasilan tetap (Siltap) untuk perangkat desa. "Kita di Buleleng bisa mengamprah Siltap setiap awal bulan sehingga perangkat desa bisa menerima gaji dengan lancar," tutup Made Subur. ■ira



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Bisnis Bali*

Kategori : *Informasi*

Buleleng Libatkan Pemerintah Desa dalam Penilaian Keterbukaan Informasi Publik

Singaraja (Bisnis Bali) -

Kabupaten Buleleng menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Bali yang melibatkan pemerintah desa dalam pemeringkatan penyedia informasi publik yang akan dilaksanakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Bali.

Selain itu, Buleleng juga akan kembali mengikuti sertakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Buleleng dalam penilaian pemeringkatan tersebut.

Hal itu terungkap dalam rapat evaluasi tentang penyedia informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Buleleng bersama dengan tim KI Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Ketua KI Provinsi Bali, I Gede Agus Astapa, S.Sos., M.M., bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati

Buleleng belum lama ini.

Usai melakukan evaluasi, Agus Astapa menegaskan evaluasi ini dilakukan karena nantinya pada 3 Oktober 2019 akan ada pemeringkatan penilaian terkait dengan pelayanan informasi publik baik dari yang sangat informatif, kurang informatif, tidak informatif, hingga tertutup.

Evaluasi ini telah dilakukan di empat kabupaten di Bali yakni Kabupaten Karangasem, Klungkung, Gianyar kemudian Kabupaten Buleleng dan lanjut ke seluruh kabupaten yang ada di Bali. "Di sini kita memastikan mereka memberikan layanan informasi kepada

masyarakat secara benar dan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan aspek yang perlu dinilai pada evaluasi ini di antaranya kepatuhan terhadap UU yang berlaku dalam menyiapkan tupoksi dan aturannya, kemudian kesiapan menanggapi pengajuan informasi, serta menyiapkan laporan permohonan informasi bulanan.

Usai melakukan proses evaluasi, Agus Astapa menambahkan sebagian besar petugas Badan Publik di Buleleng sudah memahami tentang informasi pelayanan publik walaupun masih ada beberapa yang perlu dibenahi lagi.

"Saya mengapresiasi hal tersebut dan di sinilah pentingnya evaluasi ini untuk mensosialisasikan kembali tentang informasi publik kepada badan publik yang belum memahami betul,"

jelasnya.

Sementara itu, usai mendampingi Agus Astapa dalam rapat evaluasi ini, wakil Kepala Diskominfo Buleleng, Sekretaris Diskominfo Buleleng, Made Suharta, S.Kom., M.AP mengatakan sebanyak 12 Badan Publik di Kabupaten Buleleng yang akan mengikuti penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi publik nantinya.

12 badan publik tersebut terdiri dari 5 SKPD Kabupaten Buleleng diantaranya Disbud Buleleng, Bappeda Litbang Buleleng, BKD Buleleng, Diskes Buleleng, dan Dinas PPKBPP-PA serta 7 Desa yang ada di Kabupaten Buleleng yakni Desa Pejajaran, Desa Patemon, Desa Menyali, Desa Bondalem, Desa Munduk, Desa Sumberkima dan Desa Alasangkler.

"Melalui evaluasi ini diharapkan seluruh Badan Publik tersebut dapat melengkapi apa saja yang diperlukan untuk memenuhi aspek penilaiannya," pungkasnya. ■

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG